

Perencanaan Partisipatif dalam Membangun Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Menggunakan Participatory Rural Appraisal

M. Aqshal Raihan Bukhari ^{1*}, Syafira Azzahra², Hilma Kaisa ³, Safira Audi Prameswary ⁴, M. Ananda Syaifullah ⁵, Ellies Sukmawati ⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

* aqshal.raihan21@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam memberdayakan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukaluyu, Kabupaten Bandung. PRA sebagai metode partisipatif mendorong masyarakat untuk menganalisis masalah, merencanakan pembangunan, dan merumuskan solusi secara mandiri. Populasi penelitian ini adalah buruh tani lepas dengan penghasilan rendah. Teknik penentuan narasumber menggunakan purposive sampling. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik PRA, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PRA berhasil mendorong partisipasi aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memprioritaskan permasalahan, serta menentukan pelatihan yang relevan, seperti pemasaran dan pengelolaan pangan. Intervensi tersebut berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. PRA juga menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara pendamping PKH dan warga, meningkatkan rasa memiliki terhadap program. Penelitian ini menemukan sejumlah keterbatasan dalam pelaksanaan program seperti jadwal bantuan yang tidak konsisten, minimnya pelatihan dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), serta keterbatasan sarana untuk kegiatan kelompok. Studi ini juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung kelanjutan hasil fasilitasi PRA. Secara keseluruhan, metode PRA terbukti efektif dalam membangun perencanaan berbasis masyarakat yang mendorong kesejahteraan berkelanjutan dan mengarah pada perubahan perilaku menuju kemandirian. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menggunakan pendekatan campuran (mixed-method), serta memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan agar dampak program dapat lebih luas dan berkelanjutan.

Keywords: *Perencanaan Partisipatif, Kemandirian Keluarga, Program Keluarga Harapan, Participatory Rural Appraisal*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan pembangunan yang masih dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai program perlindungan sosial, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2007, PKH telah menjadi program unggulan dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, dengan menyasar keluarga yang tergolong miskin dan rentan. Melalui skema bantuan bersyarat, PKH bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Perencanaan partisipatif dalam membangun kemandirian keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program (Triano et al, 2023). Dengan menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA), keluarga penerima manfaat diajak untuk mengidentifikasi potensi, masalah, dan kebutuhan mereka sendiri melalui berbagai teknik seperti pemetaan sosial, diskusi kelompok. Proses ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap program, tetapi juga mendorong munculnya solusi yang relevan dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi lokal (Pakaya et al, 2025).

PKH memiliki beberapa tujuan utama sebagaimana dirumuskan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos, 2021), yakni: (1) meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM) melalui akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; (2) mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; (3) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan dasar; (4) menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial; serta (5) memperkenalkan manfaat produk dan layanan keuangan formal kepada KPM. Tujuan-tujuan ini menunjukkan bahwa PKH tidak semata memberikan bantuan finansial, namun lebih jauh mengarah pada pemberdayaan dan transformasi sosial yang berkelanjutan. Implementasinya, keberhasilan PKH tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan secara administratif, melainkan juga dari sejauh mana program ini mampu membangun kemandirian keluarga penerima manfaat (Nurwan et al, 2020). Kemandirian adalah tujuan hakiki dari program ini. Artinya, PKH tidak ditujukan untuk membentuk ketergantungan baru, melainkan untuk mendorong keluarga miskin agar mampu mandiri dan sejahtera tanpa bantuan jangka panjang dari pemerintah. Dengan kata lain, keluarga yang tergabung dalam program ini diharapkan dapat "lulus" atau melakukan *graduasi mandiri* dari status sebagai penerima manfaat (Sudirman et al, 2024).

Kemandirian keluarga dapat dipahami sebagai kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan, tanpa tergantung pada pihak lain (Suratman, 2017). Konteks PKH, kemandirian tersebut menjadi indikator penting menuju keberhasilan program. Sayangnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat graduasi mandiri KPM masih tergolong rendah. Peneliti mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah belum tercapainya kemandirian ekonomi di kalangan keluarga penerima manfaat (Solihah, 2020). Kondisi ekonomi yang lemah ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, sehingga menghambat keluarga untuk keluar dari jerat kemiskinan. Kemandirian ekonomi merupakan pilar penting dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, peningkatan pendapatan keluarga, pengembangan usaha mikro, serta pelatihan keterampilan kerja menjadi strategi utama. Kemandirian ekonomi memiliki peran penting dalam mengubah pola pikir masyarakat dari bergantung kepada bantuan menjadi masyarakat yang produktif dan mandiri, bahkan dapat berkontribusi pada lingkungannya (Darmayanti, 2020). Pemerintah juga menaruh perhatian pada bidang ini sebagai bagian dari pemberdayaan sosial, dengan mendorong pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal.

Upaya membangun kemandirian ekonomi tidak dapat dilakukan secara top-down. Peran aktif masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat itu sendiri, sangatlah penting. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang partisipatif dan responsif terhadap konteks lokal. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung hal ini adalah Participatory Rural Appraisal (PRA). PRA merupakan metode partisipatif yang mendorong masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam proses identifikasi masalah, analisis kebutuhan, serta perumusan dan pelaksanaan solusi (Mustanir et al, 2018). Pendekatan ini menempatkan pengetahuan lokal sebagai dasar

pengambilan keputusan, sehingga solusi yang dihasilkan lebih relevan, aplikatif, dan berkelanjutan.

Penerapan metode PRA memungkinkan keluarga penerima manfaat tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga menjadi subjek yang berdaya. PRA memperkuat prinsip perencanaan partisipatif, merupakan proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat penerima program, dalam menyusun perencanaan pembangunan. Proses ini tidak hanya meningkatkan legitimasi dari kebijakan atau program yang dijalankan, namun juga memperkuat kesadaran dan kapasitas politik masyarakat. menambahkan bahwa perencanaan partisipatif dapat menghindarkan manipulasi dalam pelaksanaan program serta memberikan nilai tambah dalam aspek keberlanjutan. Pelaksanaan PRA dalam konteks PKH dapat diterjemahkan melalui kegiatan seperti pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan lokal, diskusi kelompok terfokus, pemetaan aset lokal, hingga perencanaan usaha mandiri. Di berbagai daerah, keluarga penerima manfaat menunjukkan ketertarikan terhadap pelatihan seperti membuat pola baju, pemasaran produk (*marketing*), hingga manajemen usaha kecil. Dengan keterampilan tersebut, diharapkan KPM dapat mengembangkan unit usaha keluarga yang dapat menunjang penghasilan secara mandiri.

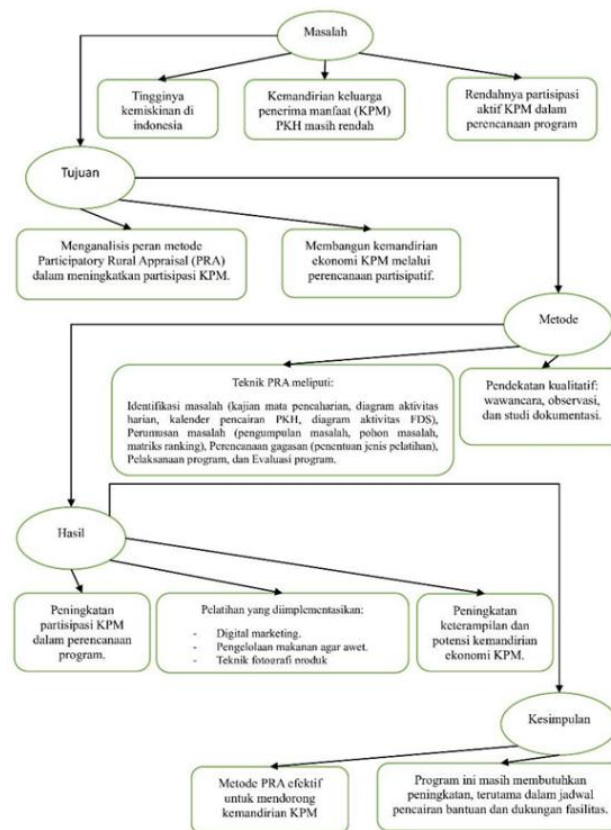
Penelitian menyoroti bahwa keterlibatan aktif keluarga dalam proses perencanaan akan membentuk rasa memiliki terhadap program, yang selanjutnya berdampak positif terhadap keberlanjutan usaha ekonomi yang dibangun (Hartadi et al, 2024). Namun demikian, pendekatan top-down yang masih dominan dalam beberapa wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan PRA. Keterlibatan pendamping sosial PKH, aparat desa, serta organisasi masyarakat sipil menjadi kunci penting dalam memastikan proses PRA berjalan secara inklusif dan demokratis. Dalam konteks penelitian ini, Desa Sukaluyu dipilih sebagai lokasi studi karena memiliki potensi kolaboratif antara pendamping PKH, pemerintah desa, dan komunitas lokal yang relatif baik. Kondisi ini memungkinkan proses PRA dapat diterapkan secara lebih efektif dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pendekatan ini dalam membangun kemandirian ekonomi KPM. Penelitian ini memberikan kontribusi karena belum banyak kajian yang secara spesifik menerapkan pendekatan PRA dalam konteks PKH di wilayah pedesaan seperti Desa Sukaluyu. Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana metode PRA dapat meningkatkan partisipasi aktif keluarga dalam membangun kemandirian ekonomi. Rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimana peran metode PRA dalam meningkatkan partisipasi aktif keluarga dalam membangun kemandirian keluarga? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pelaksanaan program sosial, khususnya dalam upaya pemberdayaan keluarga penerima manfaat melalui pendekatan partisipatif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data. PRA dipilih karena mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH), dalam proses identifikasi masalah hingga perencanaan solusi berbasis kebutuhan lokal. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika sosial secara mendalam, sekaligus menguatkan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap data sekunder dari lembaga terkait (Sugiyono, 2018). Lokasi penelitian berada di Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten

Bandung, yang telah menjadi wilayah sasaran PKH sejak tahun 2009. Desa ini dipilih secara purposif karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh tani lepas dengan penghasilan rendah, sehingga sangat relevan dalam konteks kajian kemandirian ekonomi. Informan dalam penelitian ini meliputi KPM dari RW 001, 002, 010, dan 016, pendamping sosial PKH, serta perwakilan dari Puskesmas Desa Sukaluyu. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, dengan mempertimbangkan relevansi peran, pengalaman, dan pengetahuan mereka terhadap isu yang diteliti (Kumara, 2019).

Pelaksanaan PRA dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain penyelesaian perizinan, kunjungan awal dan sosialisasi, pengkajian data sekunder, pembentukan tim PRA yang melibatkan ketua kelompok KPM dan pihak desa, penyusunan dan penyajian rancangan PRA, serta persiapan pelaksanaan kegiatan (Astari et al, 2021). Tahapan ini bertujuan untuk membangun kolaborasi yang kuat antara masyarakat, pendamping, dan pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan. Data dianalisis menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al, 2019). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Selama proses penelitian, etika penelitian dijunjung tinggi, termasuk penggunaan informed consent, menjaga kerahasiaan identitas informan, serta menghormati nilai dan norma lokal. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik mengenai peran PRA dalam mendorong partisipasi aktif keluarga menuju kemandirian ekonomi.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Alur perencanaan partisipatif dalam membangun kemandirian keluarga penerima manfaat (KPM) PKH menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) Seperti pada gambar 1. Dimulai dari permasalahan seperti tingginya kemiskinan, rendahnya kemandirian KPM, dan kurangnya partisipasi aktif dalam perencanaan program, tujuan utamanya adalah menganalisis peran metode PRA untuk meningkatkan partisipasi KPM serta membangun kemandirian

ekonomi mereka melalui perencanaan partisipatif. Metode yang digunakan meliputi pendekatan kualitatif dengan teknik PRA seperti pemetaan masalah, diskusi kelompok, dan penyusunan rencana aksi. Hasil dari proses ini adalah peningkatan partisipasi KPM, pelatihan keterampilan ekonomi, dan meningkatnya kemandirian keluarga. Kesimpulannya, metode PRA terbukti efektif mendorong kemandirian KPM, namun program tetap memerlukan pendampingan dan peningkatan fasilitas agar hasilnya berkelanjutan.

Hasil

Program Keluarga Harapan (PKH) sudah ada di Desa Sukaluyu sejak tahun 2009. Program ini bertujuan membantu masyarakat dalam mendapatkan bantuan sosial guna mengurangi beban keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukaluyu terbagi menjadi 16 kelompok berdasarkan jumlah RW yang ada, dan mayoritas anggotanya adalah seorang buruh tani. Dalam pelaksanaannya, teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) sangat menekankan partisipasi aktif masyarakat di setiap tahap kegiatan, dengan fokus pada peningkatan kemandirian komunitas. Melalui pendekatan PRA, masyarakat desa tidak lagi sekadar menjadi penerima program dengan pendekatan top down, tetapi berperan sebagai pelaku pembangunan yang aktif (bottom up). Mereka terlibat langsung dalam proses perencanaan, penentuan prioritas, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan yang dikelola di tingkat desa (Rahmatullah et al., 2024). Tingginya partisipasi masyarakat berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan program dalam upaya mencapai kesejahteraan mereka (Hudayana et al., 2019). Dalam penerapan teknik Participatory Rural Appraisal (PRA), peneliti berperan sebagai fasilitator. Peran ini mencakup menjembatani kesenjangan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta membantu masyarakat untuk berpartisipasi aktif, memberikan kontribusi, terlibat dalam kegiatan, dan merumuskan kesepakatan bersama. Selain itu, fasilitator juga bertanggung jawab melakukan evaluasi dan monitoring selama proses PRA berlangsung (Khoiriyah et al, 2025). Praktikan membagi pelaksanaan teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) kedalam beberapa hari, dan mengadaptasi alur tahapan pendekatan Participatory Rural Appraisal diantaranya yaitu (Bukhari et al, 2025):

Tahap Pertama adalah mengidentifikasi masalah, kebutuhan, serta potensi wilayah pedesaan secara umum.

Sebelum melaksanakan kegiatan Participatory Rural Appraisal (PRA) bersama masyarakat, praktikan membangun hubungan dengan penduduk setempat untuk mengumpulkan informasi dan menggali isu-isu sosial yang ada di Desa Sukaluyu. Upaya menjalin hubungan ini juga bertujuan untuk membangun kepercayaan dengan sejumlah anggota masyarakat sebagai langkah awal untuk menjangkau berbagai elemen yang ada di komunitas. Tahap ini untuk mengidentifikasi masalah pada Program Keluarga Harapan maka diperlukan teknik PRA sebagai medianya. Dalam pelaksanaannya jumlah tim PRA dari masyarakat yaitu berjumlah 4 orang yang terbagi menjadi pemandu diskusi, pemerhati proses, penerjemah, dan juga sebagai pencatat. Adapun anggota yang hadir pada pelaksanaan PRA berjumlah 20 orang. Kegiatan PRA dimulai dengan registrasi atau pencatatan kehadiran. Setelah itu, peserta duduk dengan tertib di bangku yang sudah disediakan, dan acara dilanjutkan dengan sesi pembukaan. Selanjutnya, petugas pemandu diskusi memimpin pelaksanaan setiap sesi sesuai dengan agenda yang telah direncanakan, yaitu pertama kajian mata pencaharian, selanjutnya diagram aktivitas harian, kemudian kalender pencairan PKH dan pelaksanaan Family Development Session (FDS), dan terakhir diagram aktivitas FDS. Berikut pemaparan dari empat teknik PRA:

1. Kajian Mata Pencaharian

Teknik kajian mata pencaharian yang digunakan dalam Participatory Rural Appraisal (PRA) bertujuan untuk memfasilitasi diskusi mengenai berbagai aspek mata pencaharian masyarakat. Jenis-jenis mata pencaharian dan aspeknya dapat digambarkan dalam sebuah bagan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memfasilitasi diskusi masyarakat mengenai berbagai aspek mata pencaharian, baik yang dilakukan di dalam desa maupun di luar desa. Aspek yang dikaji meliputi jumlah orang yang terlibat dalam setiap jenis pekerjaan. Di Desa Sukaluyu, mata pencaharian yang paling dominan adalah buruh tani lepas, dengan rata-rata penghasilan harian sekitar 30 ribu rupiah, yang sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, terdapat juga buruh harian lepas, pedagang, penjahit, supir, dan peternak sapi serta bebek. Masyarakat di desa ini menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena pendapatan yang diperoleh dari berbagai pekerjaan tersebut sangat terbatas.

2. Diagram Aktivitas Harian

Diagram aktivitas harian digunakan untuk menganalisis aktivitas sehari-hari selama 24 jam berfungsi untuk membandingkan kegiatan antara suami, istri, dan anak. Dengan menggunakan metode "lingkar 24 jam," setiap individu dapat mencatat jenis pekerjaan yang dilakukan serta waktu yang dihabiskan untuk berbagai aktivitas, seperti bekerja di ladang, melakukan pekerjaan rumah tangga, bersekolah, dan waktu istirahat. Hal ini memungkinkan identifikasi waktu sibuk dan waktu luang bagi masing-masing anggota keluarga. Diagram aktivitas harian berperan penting dalam melihat pola pembagian waktu atau kegiatan dalam keluarga, baik yang bersifat produktif maupun reproduktif. Pembuatan bagan harian dibedakan untuk suami, istri, dan anak. Berdasarkan diagram aktivitas harian di Desa Sukaluyu, dapat dilihat bahwa di saat waktu produktif suami paling banyak menghabiskan waktu untuk bekerja yaitu sekitar 10 jam per hari. Begitupun untuk istri paling banyak menghabiskan waktu untuk bekerja yaitu selama 6 jam di saat waktu produktif, dan terdapat beberapa waktu luang yang dimanfaatkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan beristirahat. Sedangkan untuk anak, waktu produktif paling banyak dihabiskan untuk sekolah, selain itu juga dihabiskan untuk mengaji dan bermain (Gambar 3)



Gambar 3. Diagram Aktivitas Harian

3. Kalender Pencairan PKH dan Pelaksanaan FDS

Penerapan teknik ini di Desa Sukaluyu, kalender musim digunakan untuk pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pelaksanaan Family Development Session (FDS). Menurut warga setempat, pembagian PKH akan dilakukan pada bulan Agustus, Oktober, Desember 2023, serta Januari, Maret, dan April 2024. Sementara itu, pelaksanaan FGD akan dilakukan setiap tiga bulan sekali, yaitu pada bulan Juli dan Oktober 2023, serta Januari, Maret, dan April 2024. Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya jadwal yang pasti dan konsisten dari pencairan PKH maupun pelaksanaan FDS. Sebagaimana gambar 4.



Gambar 4. Kalender PKH dan FDS

4. Diagram Aktivitas FDS

Konteks pelaksanaan FDS, diagram aktivitas FDS digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran terkait pembagian waktu saat pelaksanaan FDS. Dari diagram di atas menunjukkan bahwa kegiatan dimulai dengan 10 menit pembukaan, diikuti oleh 10 menit permainan atau ice breaking, pemaparan materi oleh pendamping selama 60 menit yang dapat disertai dengan video penyuluhan, sesi tanya jawab selama 30 menit, dan diakhiri dengan penutupan selama 10 menit. Diagram aktivitas ini memberikan gambaran yang jelas tentang alur kegiatan selama FDS dan membantu dalam mengevaluasi efektivitas program tersebut.



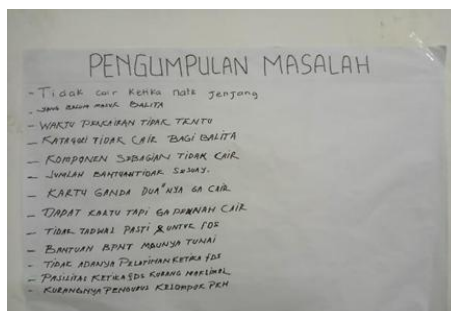
Gambar 5. Diagram Aktivitas FDS

Tahap Kedua, Perumusan Masalah Dan Penetapan Prioritas Masalah.

Merumuskan masalah dan menetapkan prioritas masalah, praktikan melakukan beberapa rangkaian yaitu pengumpulan masalah, pengelompokan masalah, pohon masalah, dan matriks ranking. Berikut adalah penjabaran dari tiap rangkaian:

1. Pengumpulan Masalah

Pengumpulan masalah dalam teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah proses partisipatif untuk mengidentifikasi, memahami, dan mendefinisikan masalah-masalah yang dihadapi oleh komunitas secara bersama-sama. Proses ini melibatkan anggota masyarakat sebagai pihak utama untuk memastikan bahwa pandangan, pengalaman, dan prioritas mereka menjadi dasar dalam memahami situasi.

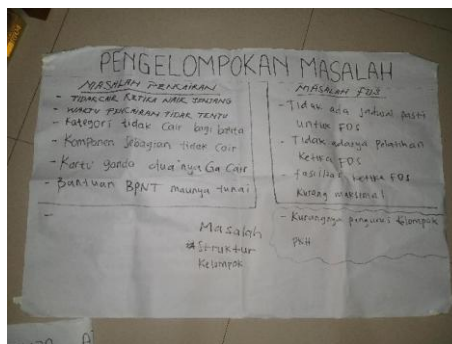


Gambar 6. Pengumpulan Masalah

Berdasarkan gambar 6 di atas terdapat 12 masalah yang disebutkan dalam forum oleh para partisipan. Masalah tersebut yaitu: bantuan yang tidak cair ketika anak naik jenjang pendidikan, tidak cair bantuan untuk kategori balita, waktu pencairan tidak menentu, sebagian komponen tidak cair, jumlah bantuan tidak sesuai, kartu ganda, tidak ada dana pencairan yang masuk, tidak ada jadwal pasti untuk FDS, bantuan BPNT dalam bentuk tunai, tidak adanya pelatihan ketika FDS, fasilitas ketika FDS kurang memadai, dan kurangnya pengurus kelompok PKH.

2. Pengelompokan Masalah

Pengelompokan masalah dalam teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah proses untuk mengorganisasi atau mengelompokkan berbagai masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan kesamaan sifat, tema, atau akar penyebabnya. Tujuan dari pengelompokan masalah ini adalah untuk menyederhanakan pemahaman, memprioritaskan solusi, dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan bersama. Pengelompokan masalah tersebut membantu meningkatkan partisipan untuk memberikan dan membagikan berbagai pengalaman dan pengetahuan mereka secara langsung sehingga dapat membantu praktikan dalam memahami kondisi permasalahan yang ada.



Gambar 7. Pengelompokan Masalah

Berdasarkan gambar 7 di atas, pengelompokan masalah terbagi menjadi dua, yaitu masalah pencairan dana dan masalah FDS. Masalah pencairan dana terdiri dari: bantuan yang tidak cair ketika anak naik jenjang pendidikan, tidak cair bantuan untuk kategori balita, waktu pencairan tidak menentu, sebagian komponen tidak cair, jumlah bantuan tidak sesuai, kartu ganda, tidak ada dana pencairan yang masuk, dan bantuan BPNT dalam bentuk tunai. Sedangkan kategori masalah FDS terdiri dari: tidak ada jadwal pasti untuk FDS, tidak adanya pelatihan ketika FDS, dan fasilitas ketika FDS kurang memadai.

3. Pohon Masalah

Pohon masalah adalah salah satu teknik dalam PRA yang digunakan untuk menganalisis suatu masalah yang telah diidentifikasi oleh teknik-teknik PRA yang telah di gunakan. Dalam teknik ini, praktikan memfasilitasi dengan menggambar satu pohon besar yang di mana dalam gambar pohon besar itu terbagi menjadi tiga bagian yaitu, akar pohon (penyebab permasalahan), batang pohon (masalah yang di hadapi), dan daun (dampak permasalahan). Teknik pohon masalah ini, praktikan menginginkan semua partisipan berperan aktif dalam diskusi untuk memberikan pandangannya terhadap empat bagian tersebut dengan cara menempelkan sticky note dengan menuliskan permasalahan yang sesuai pada bagiannya sehingga nantinya mendapatkan hasil yang relevan dan sejalan antara sebab, akibat dan juga dampak pada permasalahan tersebut. Permasalahan yang ada pada pohon masalah di atas ini ialah tidak adanya pelatihan ketika pertemuan FDS, fasilitas yang kurang disaat pertemuan FDS, kurangnya pengurus kelompok PKH, waktu pencairan tidak menentu, dan kurangnya pemberitahuan informasi terkait bantuan.



Gambar 8. Pohon Masalah

Penyebab pada pohon masalah di atas ini ialah waktu yang terbatas di saat FDS, tempat yang kurang memadai pada saat FDS, kurangnya minat KPM PKH terhadap kegiatan FDS, tidak ada jadwal yang pasti, tidak memiliki modal untuk mengadakan pelatihan, kurangnya dukungan dari lembaga yang terkait yang ada di desa, tidak adanya insentif untuk para pengurus PKH, kurangnya minat menjadi pengurus PKH, kerjaan menjadi pengurus PKH terlalu banyak, dan kurangnya komunikasi antara KPM PKH dengan pendamping PKH. Akibat pada pohon masalah di atas ini ialah terbatasnya kemampuan atau skill yang dimiliki oleh KPM PKH untuk melakukan pelatihan, tidak ada penghasilan tambahan, para KPM PKH menjadi ketergantungan dengan adanya bantuan ini, kurangnya pemahaman terhadap apa yang diberikan oleh pendamping saat FDS, dan timbulnya kebingungan serta kegaduhan oleh KPM PKH terkait kurangnya informasi bantuan oleh pendamping PKH.

4. Matriks Ranking

Matriks ranking merupakan salah satu teknik PRA yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah topik masalah utama dengan cara memberikan nilai masing-masing terhadap masalah utama tertentu dengan berbagai macam kriteria (Amalia et al, 2025). Tujuan dari matriks ranking ini untuk mencari dan menentukan permasalahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga hal tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu dari masalah utama yang lain (Sutriyono et al, 2025).

Matriks Ranking									
MASALAH UTAMA	SEBAB - SEBAB MASALAH	AKIBAT	PENTING MASALAH				Jumlah Nilai	PANGKAT	
			1	2	3	4			
Tidak adanya R. Kencana FDS	- Waktu yang terbatas - Tempat yang kurang memadai - Kurangnya minat - Tidak ada jadwal yang pasti - Tidak adanya insentif	- Keterbatasan kemampuan atau skill yang dimiliki - Tidak adanya penghasilan tambahan - Ketergantungan dengan adanya bantuan ini - Kurangnya pemahaman terhadap apa yang diberikan oleh pendamping saat FDS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29	1
Fasilitas Kencana FDS	- Kurangnya pemahaman dari pendamping saat FDS - Tidak ada jadwal yang pasti	- Keterbatasan kemampuan atau skill yang dimiliki - Tidak adanya penghasilan tambahan - Ketergantungan dengan adanya bantuan ini - Kurangnya pemahaman terhadap apa yang diberikan oleh pendamping saat FDS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24	2
Kurangnya Pemahaman Kencana FDS	- Tidak adanya insentif - Kurangnya pemahaman dari pendamping saat FDS - Tidak ada jadwal yang pasti	- Keterbatasan kemampuan atau skill yang dimiliki - Tidak adanya penghasilan tambahan - Ketergantungan dengan adanya bantuan ini - Kurangnya pemahaman terhadap apa yang diberikan oleh pendamping saat FDS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	5
Minat Pemahaman Kencana FDS	- Tidak adanya insentif - Kurangnya pemahaman dari pendamping saat FDS - Tidak ada jadwal yang pasti	- Keterbatasan kemampuan atau skill yang dimiliki - Tidak adanya penghasilan tambahan - Ketergantungan dengan adanya bantuan ini - Kurangnya pemahaman terhadap apa yang diberikan oleh pendamping saat FDS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22	4
Kurangnya Pemahaman Kencana FDS	- Tidak adanya insentif - Kurangnya pemahaman dari pendamping saat FDS - Tidak ada jadwal yang pasti	- Keterbatasan kemampuan atau skill yang dimiliki - Tidak adanya penghasilan tambahan - Ketergantungan dengan adanya bantuan ini - Kurangnya pemahaman terhadap apa yang diberikan oleh pendamping saat FDS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23	3

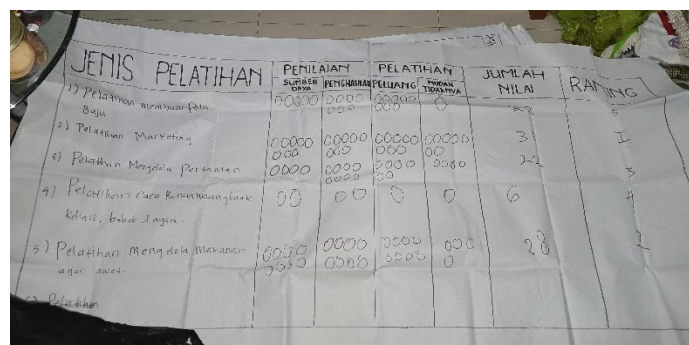
Gambar 9. Matriks Ranking

Matriks ranking (Gambar 9) terdapat lima permasalahan utama atas pertimbangan para partisipan untuk mencari solusi dan dijadikan prioritas dalam mengatasi masalah. Dari lima permasalahan utama tersebut harus melewati beberapa kriteria dalam menentukan prioritas

masalah tersebut. Adapun kriteria yang harus dilihat dalam matriks ranking tersebut adalah kemendesakan, kepentingan umum, ketersediaan sumber daya (potensi), menambah pendapatan untuk KPM PKH, dan mudah tidaknya. Dengan begitu, para partisipan menentukan nilai atau skor dalam kriteria-kriteria tersebut sehingga permasalahan utama yang mendapatkan nilai atau skor yang paling tinggi yang akan menjadi prioritas untuk diatasi. Melihat matriks ranking di atas maka prioritas masalah yang akan diatasi pertama kali ialah tidak adanya pelatihan ketika pertemuan FDS dengan skor 29, lalu diikuti dengan permasalahan fasilitas yang kurang memadai pada saat FDS dengan skor 24, lalu permasalahan kurangnya pemberitahuan informasi terkait bantuan dengan skor 23, lalu permasalahan waktu pencairan tidak menentu dengan skor 22, serta yang terakhir dengan permasalahan kurangnya pengurus kelompok PKH dengan skor 14.

Tahap Ketiga, Perencanaan Penerapan Gagasan

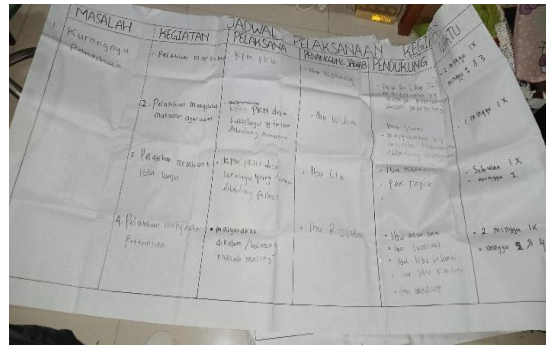
Setelah kegiatan perumusan masalah dan penetapan prioritas masalah, masuklah kita ke dalam tahap perencanaan penerapan gagasan yang diambil dari hasil matriks ranking tahapan sebelumnya. Pada matriks ranking tahapan sebelumnya didapati permasalahan yang menjadi prioritas yaitu tidak adanya pelatihan ketika FDS. Maka dari itu pada tahapan ini dilakukan PRA kembali menggunakan matriks ranking untuk mengetahui pelatihan seperti apa yang dibutuhkan oleh keluarga penerima manfaat PKH. Matriks pelatihan dalam Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengembangan kapasitas dalam suatu komunitas yaitu KPM PKH. Matriks ini membantu melibatkan anggota KPM PKH secara aktif untuk memetakan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai kemandirian.



JENIS PELATIHAN	PENILAIAN SUMBER DAYA	PENGHASILAN	PELUANG	MUDAH TIDAKNYA	JUMLAH NILAI	RANKING
1) Pelatihan membuat pola baju	0000	0000	0000	0000	0	5
2) Pelatihan Marketing	0000	0000	0000	0000	31	1
3) Pelatihan Mengelola pertanian	0000	0000	0000	0000	22	3
4) Pelatihan cara mengembangkan kelinci, bebek, dan ayam	00	00	00	00	6	4
5) Pelatihan Mengelola makanan agar awet	0000	0000	0000	0000	28	2

Gambar 10. Matriks Pelatihan

Gambar 10 di atas terdapat lima pelatihan yang diinginkan oleh keluarga penerima manfaat PKH, yaitu pelatihan membuat pola baju, pelatihan marketing, pelatihan mengelola pertanian, pelatihan cara mengembangbiakkan kelinci, bebek, dan ayam, dan pelatihan mengelola makanan. Untuk menentukan ranking dari pelatihan ini, partisipan memberikan nilai dari tiap kriteria yang terdiri dari sumber daya, penghasilan, peluang, dan mudah tidaknya. Hasil dari matriks ranking ini yaitu pelatihan marketing menempati ranking pertama dengan 31 poin, urutan kedua yaitu pelatihan mengelola makanan agar awet dengan 28 poin, kemudian urutan ketiga terdapat dua pelatihan dengan poin yang sama yaitu pelatihan membuat pola baju dan pelatihan mengelola pertanian dengan masing-masing 22 poin, dan urutan terakhir yaitu pelatihan mengembangbiakkan kelinci, bebek, dan ayam dengan 6 poin. Setelah itu, tim PRA bersama partisipan merumuskan jadwal pelaksanaan kegiatan. Pada kegiatan ini dibahas mengenai kegiatan yang akan dilakukan, siapa pelaksananya, siapa yang akan menjadi penanggungjawab dalam kegiatan itu, pihak yang akan mendukung, serta waktu pelaksanaan dari kegiatan tersebut.



MASALAH	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	PELAKSANAAN	KELOMPOK
1. Kurangnya penerangan	Pelatihan pemasaran	KPM PKH	1. Buana	1. 1 orang
2. Pelatihan mengelola makanan agar awet	Pelatihan pemasaran	KPM PKH	1. Buana	1. 1 orang
3. Pelatihan membuat pola baju	Pelatihan pemasaran	KPM PKH	1. Buana	1. 1 orang
4. Pelatihan mengelola pertanian	Pelatihan pemasaran	KPM PKH	1. Buana	1. 1 orang

Gambar 11. Matriks Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil rumusan mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan, berikut penjabaran terkait jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk KPM PKH: (1) Pelatihan marketing dilaksanakan dua minggu sekali, tiap minggu pertama dan minggu ketiga, (2) Pelatihan mengelola makanan agar awet dilaksanakan satu minggu sekali, dan (3) Pelatihan membuat pola baju dilaksanakan satu bulan sekali, pada minggu pertama. Pelatihan mengelola pertanian dilaksanakan dua minggu sekali, pada minggu kedua dan keempat.

Tahap Keempat, Pelaksanaan Program

Dalam tahap ini merupakan wujud nyata dari perencanaan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pada tahap sebelumnya didapatkan pelatihan yang paling dibutuhkan yaitu pelatihan marketing. Maka dari itu praktikan bersama KPM PKH di Desa Sukaluyu melaksanakan pelatihan pemanfaatan media sosial sebagai platform digital marketing. Selain itu, praktikan juga menggelar pelatihan fotografi guna menunjang kebutuhan ketika memasarkan produk yang mereka jual di sosial media. Tidak hanya itu, praktikan juga melaksanakan penyuluhan terkait modal usaha yang bertujuan memberikan pengetahuan kepada KPM PKH dalam mengakses modal usaha.



Gambar 12. Pelatihan Digital Marketing

Pelatihan pemanfaatan media sosial sebagai platform digital marketing merupakan program pemberdayaan yang dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Pelatihan ini berfokus pada cara memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp sebagai platform pemasaran produk atau jasa, karena WhatsApp merupakan sosial media yang paling banyak digunakan oleh KPM PKH. Melalui materi yang mencakup pembuatan konten menarik, strategi penjualan online, hingga pengelolaan akun media sosial yang profesional, pelatihan ini bertujuan untuk memberdayakan para KPM PKH agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dalam dunia usaha.

Selain itu, terdapat pelatihan foto produk bagi KPM PKH di Desa Sukaluyu, program ini bertujuan untuk mengajarkan cara memotret produk dengan teknik yang sederhana namun efektif agar terlihat lebih menarik bagi pembeli. Dalam pelatihan ini, peserta diajarkan mengenai pengaturan pencahayaan, pemilihan sudut foto, penggunaan latar belakang yang sesuai, serta teknik editing sederhana menggunakan aplikasi gratis. Dengan memanfaatkan alat yang tersedia seperti kamera smartphone, peserta diajak untuk menciptakan visual produk yang menarik tanpa memerlukan peralatan profesional.



Gambar 13. Pelatihan Fotografi

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para peserta pelatihan dalam mempresentasikan produk mereka secara lebih estetik dan profesional melalui foto. Dengan hasil foto yang menarik, produk dari para KPM PKH Desa Sukaluyu diharapkan dapat lebih mudah diterima pasar, baik secara online maupun offline. Selain meningkatkan daya tarik produk, pelatihan ini juga diharapkan mampu membantu peserta membangun citra usaha yang lebih terpercaya, sehingga dapat meningkatkan peluang penjualan dan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka. Selain dua pelatihan tersebut terdapat penyuluhan tentang modal usaha. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta, khususnya KPM PKH, mengenai cara mendapatkan modal finansial untuk memulai atau mengembangkan usaha. Dalam penyuluhan ini, peserta diberikan informasi tentang berbagai sumber modal, seperti pinjaman mikro, program pemerintah, koperasi, hingga lembaga keuangan syariah. Selain itu, mereka juga diajarkan cara menyusun proposal usaha yang baik, pengelolaan keuangan yang bijak, serta pentingnya tanggung jawab dalam pengembalian pinjaman.



Gambar 14. Penyuluhan Modal Usaha

Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan peserta, membantu mereka memahami berbagai pilihan sumber modal, dan memberikan strategi untuk mengakses pendanaan secara efektif. Dengan pemahaman ini, peserta diharapkan dapat memanfaatkan modal yang didapatkan secara optimal untuk menjalankan usaha yang berkelanjutan. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan mendukung

kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan usaha yang lebih terencana. Namun masih banyak KPM PKH yang belum memahami akan pentingnya hal tersebut. Mereka bahkan juga tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan akses permodalan finansial dan keterampilan untuk usaha yang akan mereka mulai. Hal tersebut tentu dapat diatasi oleh pemberian pemahaman yang mendalam kepada KPM PKH. Akan tetapi nyatanya kegiatan sosialisasi dan pembelajaran mengenai modal usaha masih jarang dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat, terutama pada wilayah pedesaan.

Tahapan Kelima yaitu Evaluasi Program

Setelah program dilaksanakan, evaluasi menjadi langkah penting agar Tim PRA bersama masyarakat dapat memahami aspek-aspek yang telah berjalan dengan baik serta mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Melalui evaluasi ini, solusi dapat dirumuskan untuk memastikan keberlanjutan program PRA dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) mampu meningkatkan partisipasi aktif keluarga penerima manfaat (KPM) dalam merancang kegiatan yang mendukung kemandirian ekonomi. PRA mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek bantuan, tetapi juga subjek pembangunan yang aktif dan kritis. Dalam pelaksanaan PRA di Desa Sukaluyu, keterlibatan KPM tercermin dari berbagai kegiatan seperti pemetaan sosial, identifikasi masalah, diskusi kelompok terarah, hingga perumusan program kerja berbasis kebutuhan lokal. Melalui tahapan tersebut, KPM berhasil mengidentifikasi sejumlah permasalahan utama yang menghambat kemandirian mereka, seperti ketergantungan terhadap bantuan sosial, rendahnya keterampilan kewirausahaan, dan terbatasnya akses terhadap pasar. Proses ini menunjukkan bahwa PRA dapat menjadi sarana efektif untuk menggali kebutuhan riil masyarakat yang tidak selalu terlihat melalui pendekatan konvensional. Temuan ini sejalan dengan teori pemberdayaan yang menekankan pentingnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengontrol sumber daya, informasi, dan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Lebih lanjut, pendekatan PRA ini juga memperlihatkan dinamika sosial yang positif. Diskusi kelompok yang difasilitasi oleh pendamping sosial PKH memberikan ruang partisipatif bagi semua anggota masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal. Warga tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga aktif menawarkan solusi dan merancang kegiatan yang mereka nilai relevan, seperti pelatihan pengolahan makanan ringan, pelatihan pemasaran digital, dan penguatan usaha rumahan. Hasil diskusi ini kemudian diwujudkan dalam kegiatan pelatihan yang melibatkan narasumber dari dalam maupun luar desa. Aktivitas tersebut secara tidak langsung memperkuat solidaritas sosial dan semangat gotong royong antarwarga. Selain menghasilkan rencana aksi yang kontekstual, PRA juga berkontribusi terhadap peningkatan rasa kepemilikan dan tanggung jawab warga terhadap program. Ketika warga terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan, mereka cenderung lebih antusias dan komitmen terhadap keberhasilan kegiatan. Hal ini tercermin dari adanya kesediaan warga untuk menyediakan tempat pelatihan, berbagi alat produksi, hingga memfasilitasi kelompok belajar secara mandiri. PRA memicu tumbuhnya semangat swadaya, yang menjadi dasar dari pembangunan yang berkelanjutan.

Dari sisi implementasi, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pendekatan PRA tidak dapat dipisahkan dari peran pendamping sosial PKH. Pendamping yang memiliki kapasitas fasilitasi yang baik mampu menjaga dinamika kelompok tetap aktif dan fokus pada pencapaian tujuan bersama (Khoiriyah et al, 2025). Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pendamping memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk mendampingi setiap kelompok secara optimal. Hal ini menjadi tantangan serius mengingat intensitas dan konsistensi pendampingan sangat memengaruhi hasil dari proses PRA. Selain itu, keterbatasan dukungan logistik dari pemerintah desa juga menjadi kendala yang sering dihadapi. Beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan secara maksimal karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung (Nurwan & Hasan, 2020). Misalnya, ketersediaan tempat pelatihan yang layak, alat peraga, serta bahan pelatihan yang memadai. Di sisi lain, program P2K2 yang seharusnya menjadi wadah pembinaan dan edukasi secara berkelanjutan belum sepenuhnya difungsikan secara optimal. Sebagian besar KPM menganggap P2K2 hanya sebagai rutinitas administratif, bukan forum pemberdayaan yang substantif.

Keterlibatan pemerintah desa juga menjadi faktor krusial dalam keberlanjutan program. Pemerintah desa yang mendukung proses PRA, seperti dengan mengalokasikan dana desa untuk penguatan kelompok usaha KPM, terbukti mampu memperpanjang dampak positif dari PRA. Namun tidak semua desa memiliki komitmen yang sama. Oleh karena itu, diperlukan advokasi kebijakan yang lebih intensif untuk menjadikan PRA sebagai pendekatan resmi dalam perencanaan pembangunan desa (Sutriyono et al, 2025). Lebih jauh lagi, kolaborasi multipihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Keterlibatan LSM, dunia usaha, dan institusi pendidikan dapat menjadi mitra strategis dalam menyediakan pelatihan lanjutan, akses permodalan, serta pendampingan usaha. Penguatan jaringan antar komunitas KPM juga penting agar tercipta ekosistem pembelajaran dan pemberdayaan yang saling mendukung (Darmayanti, 2020). Dalam konteks ini, praktik PRA dapat dikembangkan sebagai model inkubasi sosial yang berorientasi pada penguatan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti bahwa PRA tidak hanya mampu menggali potensi lokal, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan kelembagaan masyarakat. Ketika difasilitasi dengan baik, PRA berfungsi sebagai alat yang memadukan antara pendekatan teknis perencanaan dan pendekatan sosial kultural berbasis lokal (Hudayana et al, 2019). Melalui metode ini, keluarga penerima manfaat PKH dapat bertransformasi dari penerima bantuan pasif menjadi pelaku pembangunan yang aktif dan berdaya. Implementasi PRA dalam PKH tidak hanya sebatas metode teknis, namun juga strategi pemberdayaan berkelanjutan berbasis masyarakat. Dengan demikian, integrasi PRA dalam program-program pemberdayaan seperti PKH perlu dipertimbangkan sebagai strategi jangka panjang untuk mendorong keberlanjutan dan efektivitas program. Tidak hanya memberikan solusi atas masalah ekonomi, PRA juga membuka ruang bagi munculnya kepemimpinan lokal, solidaritas sosial, dan kapasitas kolektif dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukaluyu efektif dalam meningkatkan partisipasi aktif Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam merencanakan dan melaksanakan program untuk mencapai kemandirian ekonomi. Kelebihan metode PRA yaitu berhasil mendorong keterlibatan masyarakat melalui identifikasi masalah, perumusan prioritas masalah, dan pengembangan pelatihan yang relevan, seperti pelatihan pemanfaatan media sosial sebagai platform digital marketing dan pengelolaan makanan agar

awet. Hal ini dapat membuka peluang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan mereka. Meskipun terdapat kelebihan, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan PKH, termasuk konsistensi jadwal pelatihan dan pencairan bantuan, serta peningkatan fasilitas dan dukungan bagi pengurus PKH. Temuan ini dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi pemberdayaan berbasis partisipasi di tingkat desa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain ruang lingkup yang terbatas pada satu desa, yaitu Desa Sukaluyu, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke wilayah lain; keterbatasan waktu yang menyebabkan proses observasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak dilakukan secara mendalam; serta dominasi data kualitatif yang sangat bergantung pada narasi subjektif informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian, menggunakan metode campuran agar data lebih variatif, serta melakukan pendampingan jangka panjang terhadap KPM. Kolaborasi lebih erat dengan pendamping PKH dan pemerintah daerah juga dianjurkan guna memperkaya perspektif kelembagaan dan implementatif dalam penelitian.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Amalia, V., Eriyani, E., & Fatimah, S. (2025). Membangun Kemandirian Finansial Penerima PKH Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan yang Praktis dan Berkelanjutan. *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, 3(1), 95-101. <https://doi.org/10.61124/1.renata.145>
- Astari, N. M., & Efelina, V. (2021). Penerapan PRA pada Usaha Susu Kedelai. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 5(1), 164–172. <https://doi.org/10.36841/integritas.v5i1.919>
- Bukhari, M. A. R., Azzahra, S., Kaisa, H., Prameswary, S. A., Syaifullah, M. A., & Sukmawati, E. (2025). Perencanaan Partisipatif dalam Membangun Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat PKH Menggunakan PRA. *Journal Social Society*, 5(2).
- Darmayanti, H. (2020). Peran Pendamping Program Keluarga harapan di Gampong Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Hartadi, M. I., Arif, A., & Poerwanti, S. D. (2024). Menguk Hambatan Graduasi PKH. *Jurnal Lindayasos*, 6(1), 1-9. <http://dx.doi.org/10.31595/lindayasos.v6i1.1132>
- Hudayana, B., Kutanegara, P. M., Setiadi, S., Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., Nugraheni, M. D. F., ... & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya*, 2(2), 3. <https://doi.org/10.22146/bb.50890>
- Kemensos RI. (2021). Pedoman Umum Program Keluarga Harapan. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Khoiriyah, A., Rizky, R., Kartika, V., Helmy, I., & Sukmawati, E. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 946-954. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1287>
- Kumara, A. R. (2019). Buku Ajar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: UAD Press.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE.
- Mustanir, A., & Yasin, A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Transect pada Perencanaan Pembangunan Community Participation in Transect on Development Planning. *Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik* Volume, 8, 137-146. <https://doi.org/10.26858/jiap.v8i2.7994>
- Nurwan, T. W., & Hasan, H. (2020). Keberhasilan PKH ditinjau dalam kaitannya dengan keterampilan pendamping dan partisipasi KPM: Studi di Sijunjung Sumatera Barat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 1-13. <http://dx.doi.org/10.33007/ska.v10i1.2035>
- Pakaya, G., Djaafar, L., Kamuli, S., & Mozin, N. (2025). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 5(1), 143-149. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i1.4969>
- Rahmatullah, L. K., Zenrif, F., & Supriyadi, S. (2024). Analisis kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga perspektif hukum perkawinan. *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 16(1), 17-40. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.11022>
- Solihah, R. (2020). Perencanaan Partisipatif Dalam Program Citarum Harum Di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(01). <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i1.24860>
- Sudirman, A. N. A., Febriona, R., Pakai, Z. J., & Bagu, N. R. (2024). Edukasi Peningkatan Kemandirian Keluarga Pasien TB di Wilayah Kerja Puskesmas Paguyaman Kabupaten Boalemo. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 623-630. <https://doi.org/10.46576/rjpkkm.v5i2.4487>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman. (2017). *Perencanaan Partisipatif dan Pembangunan Desa*. Malang: UB Press.
- Sutriyono, S., Husin, A., & Huda, E. Z. U. (2025). Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Kelompok Wanita Tani (Participatory Action Research: Peningkatan Sikap dan Pengetahuan) di Kelurahan Banmati. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur (JEBDEKER)*, 5(2), 449-460. <https://doi.org/10.56456/rs00cz02>
- Triano, H. M., & Machdum, S. V. (2023). Pemberdayaan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM): Empowerment through Family Capacity Building Groups (P2K2) in Karawaci Sub-District, Tangerang City for Beneficiary Families (KPM). *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2), 505-517. <https://doi.org/10.37680/amalee.v4i2.3105>